

## Memaknai Ulang Obyektivitas dalam Media Massa (Sebuah Apresiasi pada Praktik Jurnalisme Subyektif)

Edi Santoso

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED

### Abstract

*Objectivity has become the basis for the practice of contemporary journalism. Objectivity has become a major issue during the last century. However, the ethical debate about objectivity was never finished. Even the debate that starts from the definition of objectivity itself, the criteria, until the question of pessimism, is it possible there is objectivity in this world? Along with the increasing number of criticisms of objective journalism, the idea of subjective journalism increasingly widely accepted. Subjective journalism often simply interpreted as journalism in context. That is, journalists do not merely present the facts, but also presents the meaning. This paper tries to elaborate the notion of subjective journalism and explore its relevance in contemporary journalism.*

**Keywords :** Journalism, Subjectivity, Objectivity

### Pendahuluan

Jurnalisme tak pernah hidup di ruang hampa. Selalu ada *setting* sosial yang lengkap dengan segala tata nilainya dalam sebuah proses pencarian, pengumpulan, dan penyebaran informasi (*journalism*). Maka perbincangan etis seputar jurnalisme atau media massa tak pernah kehilangan relevansi. Faktanya memang, selalu saja ada persoalan etis dalam praktik kerja media, baik yang kemudian berakhir di dewan etik (Dewan Pers, untuk kasus Indonesia) ataupun yang bermuara ke pengadilan. Persoalan etis itu beragam, mulai dari masalah teknis-administratif sampai yang bersifat politis-ideologis.

Di antara perdebatan etis yang selalu mengemuka adalah masalah obyektivitas. Mampukah media bersikap obyektif dalam pemberitaan? Sejauhmana obyektivitas media bisa diukur? Apakah obyektivitas berarti wartawan sama sekali tak boleh berpihak? Apakah obyektivitas berarti segala-galanya bagi kredibilitas sebuah media? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan beberapa bagian yang mewakili diskursus obyektivitas.

Secara konseptual, prinsip obyektivitas telah menjadi perhatian banyak pakar media. Maka bermunculan lah berbagai pendapat tentang obyektivitas. Westerstahl (dalam McQuail, 2005), mengatakan bahwa pemberitaan disebut objektif memenuhi dua syarat, yakni faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berarti kebenaran yang di dalamnya memuat akurasi (tepat dan cermat), dan mengkaitkan sesuatu yang relevan untuk diberitakan (relevansi). Sementara itu, imparsialitas mensyaratkan adanya keseimbangan (*balance*) dan kenetralan dalam mengungkap sesuatu.

Everret E. Denis dalam "Basic Issues in Mass Communication" (1984), menandakan bahwa obyektivitas pemberitaan hanya akan dapat dicapai, jika (1) Ada pemisahan antara fakta dan opini, (2) Ada penyajian berita tanpa disertai dimensi emosional, dan (3) Media mampu bersikap jujur dan seimbang terhadap semua pihak. Sementara itu Entman (1989) dan Nelkin (1987) sepakat bahwa obyektivitas jurnalisme dibangun di atas dua komponen, yakni depersonalisasi (*depersonalization*) dan

keseimbangan (*balance*). Depersonalisasi berarti wartawan seharusnya tidak mengekspresikan pandangan, evaluasi, dan keyakinan pribadinya dalam pemberitaan. Sedangkan keseimbangan berarti wartawan mampu menghadirkan pandangan yang mewakili kedua belah pihak yang 'berseteru' tanpa condong pada salah satunya.

Benang merah di antara pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa obyektivitas mensyaratkan seorang wartawan yang netral, tidak berat sebelah, dan selalu bekerja atas dasar fakta, bukan pandangan atau keyakinan pribadi. Berita disebut obyektif jika semata merupakan jalinan fakta yang mengafirmasi kepentingan atau suara berbagai pihak yang terlibat secara berimbang.

Pendapat tersebut memang terkesan ideal, menunjukkan kinerja wartawan yang profesional. Namun, memaknai obyektivitas semata fakta, akurasi, imparialitas dan netralitas semata bisa menjebak seorang wartawan pada kerja mekanik yang miskin makna. Padahal, semestinya jurnalistik bukan sekadar persoalan teknis, bagaimana mencari dan menulis berita, tetapi juga bagaimana wartawan membentuk makna. Menurut Bernard C. Cohen (dalam Ishwara, 1998), seorang jurnalis, sebagai mata dan telinga masyarakat, tak sekadar menyampaikan informasi (*informer*), tapi juga penafsir (*interpreter*). Sebagai penafsir, pers membebaskan diri dari netralitas dan melakukan atau membuat penafsiran. Pers melaporkan peristiwa tetapi ditambah dengan bahan-bahan dalam usahanya menjelaskan arti atau pentingnya suatu peristiwa.

Dalam tren interpretif itu, kata Kovach dan Rosenstiel (2001), seorang wartawan tak cukup dengan hanya berpegang teguh pada kebenaran fakta (akurasi). Kebenaran tak cukup diwakili oleh akurasi faktual. Mengutip pendapat Jack Fuller dalam 'News Value', mereka menandakan bahwa ada dua ujian bagi ihwal kebenaran menurut para filsuf, yakni kesesuaian (*correspondence*) dan konsistensi yang masuk akal (*coherence*).

Pada peran wartawan sebagai penafsir itulah terbuka sebuah perdebatan tentang ruang subyektif dalam kerja seorang wartawan. Tak

ada salahnya untuk mendefinisikan kembali batas-batas obyektivitas yang selama ini menjadi salah satu basis etik kerja para pencari berita.

### Jurnalisme Subyektif

Harus diakui bahwa gagasan jurnalisme objektif memang telah menjadi isu penting selama hampir satu setengah abad terakhir, yang puncaknya ketika menjadi paradigma berita utama di Amerika Serikat para tahun 1931. Waktu itu, paradigma objektif menjadi senjata utama menghadapi propaganda pasca Perang Dunia I. Sampai tahun 1930-an, jurnalisme objektif banyak dipersamakan dengan istilah netralitas, atau memisahkan antara fakta dan nilai. Dalam perkembangannya kemudian, doktrin obyektivitas menjadi strategi jitu para wartawan menghadapi berbagai "serangan". Secara ekonomis, strategi ini memang menguntungkan, karena bisa melindungi para wartawan dari tuduhan alat kepentingan politis. Dengan paham netralitas yang dianut, media kemudian merasa tidak pantas untuk disudutkan oleh siapa pun. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan netralitas secara operasional? Karena berbagai kritikan, setelah itu muncul perubahan dari fokus pada netralitas menjadi penekanan pada akurasi (*accuracy*), keseimbangan (*balance*), dan kejujuran (*fairness*). Dan dalam wacana kontemporer, imparialitas jurnalisme ini senafas dengan tujuan produksi berita yang pluralis, yakni merepresentasikan suara khalayak yang beragam latar belakang (Durham, 1998).

Sebagai sebuah ideologi, jurnalisme objektif ini didasarkan pada pandangan empiris atas dunia, yang memisahkan antara fakta dan nilai, dan percaya bahwa eksistensi fakta sebagai hal yang terpisah di luar sana. Berita didefinisikan sebagai wujud yang terpisah (*independent*) dari diri wartawan. Berita adalah fakta yang ada 'di luar sana' yang menunggu dicari dan ditulis, serta kemudian dipublikasikan oleh media (Erjavec, 2003).

Gagasan jurnalisme objektif ini memang kemudian berhadapan dengan banyak kritik.

Salah satu diantaranya, objektifitas seringkali dijadikan sebuah selubung atas kebohongan terhadap publik. Misalnya wartawan seolah-olah terbebas dari dosa setelah mematuhi kaidah pemberitaan berimbang, meliput dua pihak yang bertikai tanpa mempedulikan kebenaran dari fakta yang disampaikan pihak-pihak tersebut. Wartawan seolah lari dari tanggung jawab atas kebenaran fakta peristiwa, dengan dalih biarkan khalayak sendiri yang memaknainya.

Stephen Ward menilai, gagasan objektif untuk memisahkan antara fakta dan nilai adalah hal yang tidak mungkin, karena semua pengetahuan, bahkan termasuk data-data sains tidak bisa menjadi bebas nilai. Bahkan gagasan ini sesungguhnya merupakan penipuan, karena seorang wartawan tak lain adalah ‘aktor-aktor’ politik yang pasti memiliki bias dalam laporannya. Tidak saja bias karena faktor personal (ideologi, pengalaman) tapi juga karena tekanan eksternal (Ward, 1998).

Sebagai alternatif gagasan jurnalisme objektif ini, kemudian muncul jurnalisme subjektif atau interpretatif. Jurnalisme interpretatif secara mudah sering diartikan jurnalisme dalam konteks. Artinya, wartawan tak semata-mata menyajikan fakta, tetapi juga menyuguhkan makna. Maka, seorang wartawan interpretatif senantiasa memaknai tiap jalinan peristiwa, melihat keterkaitan antarfakta, kemudian berbagi pandangan dengan khalayak (Oetama, 2003).

Jurnalisme interpretatif mulai dikenal ketika Curtis D. MacDougall dari Northwestern University, Amerika Serikat (AS), menulis buku berjudul *Interpretative Reporting* (1938). Jurnalisme ini semakin dikenal setelah Perang Dunia II ketika pada tahun 1949 laporan *The Commission of Freedom of the Press* di AS yang diketuai Robert Hutchins mengumumkan bahwa media massa mempunyai kewajiban untuk menyajikan “penuturan yang benar, komprehensif, dan cerdas tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari dalam konteks yang memberikan makna.” Komisi ini didirikan setelah perang dengan bantuan keuangan dari Henry Luce, penerbit majalah *Time* dan *Life*, serta *Encyclopedia Britannica*, untuk

mempelajari performa media berita.

Desakan ke arah kebutuhan akan suatu reportase interpretatif muncul ketika banyak reporter yang meliput gagasan New Deal-nya Presiden Franklik D. Roosevelt pada masa depresi Besar tahun 1930-an dihadapkan pada program-program baru yang didasarkan pada teori-teori ekonomi baru. Upaya untuk mengatasi akibat-akibat depresi yang menghancurkan ekonomi itu merupakan berita dalam negeri terbesar pada tahun 1930-an. Merangsang ekonomi dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah adalah bertentangan dengan pemikiran ekonomi tradisional. Teknik lama dengan dengan mengutip pendapat-pendapat para pakar ekonomi dari kedua kubu teori yang berlawanan gagal untuk menyajikan gambaran yang lengkap tentang apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya buku *Reporting for Beginner* karya Curtis D. MacDougall yang diterbitkan pada tahun 1932 diubah judulnya menjadi *Interpretative Reporting* pada tahun 1938 dengan beberapa perubahan dan penambahan isi yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan (Kusumaningrat, 2005:239).

Gagasan interpretatif ini kemudian memicu kontroversi selama seperempat abad lebih, karena masih banyak juga wartawan yang menjadi penganut paham ‘objektif’. Menyajikan berita peristiwa dalam “suatu konteks yang bermakna” bertentangan dengan kaidah pemberitaan yang sudah diterima dan dipertahankan pada masa itu dengan sangat kukuh, yakni untuk selalu memelihara obyektivitas dalam pemberitaan. Dengan perkataan lain, berita harus faktual, bukan isapan jempol atau opini si wartawan. Dalam paruh abad ke-20, pendirian seorang pemimpin redaksi adalah: “*Just give me the fact*” (Berikan saja aku fakta-faktanya). Dasar pikirannya adalah bahwa pembaca akan melakukan interpretasinya sendiri tentang fakta-fakta. Tujuannya tak lain untuk bersikap objektif, menghindari pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta. Satu-satunya tempat dalam surat kabar untuk interpretasi adalah tajuk rencana yang ditulis oleh para pemimpin redaksi. Tajuk rencana ini memuat opini resmi surat kabar bersangkutan tentang peristiwa-

peristiwa yang sedang hangat (Kusumaningrat, 2005:238).

Jurnalisme interpretasi atau subjektif merupakan sebuah terobosan untuk mengurai benang kusut problem ‘ideologi profesi’ yang selama ini dihadapi para wartawan. Menurut Dedy N. Hidayat (dalam Syahputra, 2006), ‘ideologi profesi’ inilah yang sering membuat kening berkerut. Sebab, *mainstream* ideologi profesi yang mengutamakan “obyektivitas” pemberitaan merupakan suatu problema tersendiri, khususnya yang menyangkut dua dimensi utama konsep obyektivitas: “faktualitas” (*factuality*) dan “imparsialitas” (*impartiality*). Faktualitas, atau pengutamakan fakta dan pemisahan antara fakta dan opini, sering menyodorkan problema yang tak mudah menemukan solusi. Sebab, fakta tidak dengan sendirinya merupakan suatu “kebenaran objektif”. Suatu teks berita tentang konflik, meskipun sepenuhnya didasarkan fakta, bagaimanapun hanyalah sebuah realitas simbolik yang tidak berhubungan satu banding satu (isomorphis) dengan realitas “objektif” konflik yang diberitakan. Dari segi imparsialitas, fakta yang digunakan untuk memproduksi suatu realitas simbolik, memang bisa terdiri atas informasi dan opini figur-figur terkait. Masing-masing mungkin disajikan secara tidak berimbang; fakta tertentu bisa lebih ditonjolkan atau justru dipinggirkan.

### Obyektifitas Subyektif dan Subyektifitas Obyektif

Nampak bahwa istilah obyektivitas membawa makna yang dalam, ideal dan bercitra profesional, namun juga membingungkan. Puluhan istilah ‘obyektifitas’ seolah menjadi mantra dalam praktik jurnalisme, sebagai label profesionalisme. Jurnalisme yang benar adalah yang obyektif. Mungkin tak terhitung lagi berapa lembaga pers di dunia ini yang menggunakan istilah ‘obyektif’ sebagai semboyan atau *tag line* dalam promosinya. Namun, pertanyaan ‘Seberapa jauh kita bisa mengukur sebuah obyektifitas’ belum mendapatkan jawaban tuntas.

Di sinilah, kita perlu mendefinisikan ulang makna obyektifitas. Tentang fakta misalnya, bisakah dipisahkan dari opini? Secara konseptual, bisa, karena masing-masing bertolak dari sumber yang berbeda. Fakta adalah data-data yang kita temukan di lapangan, sementara opini lahir dari pikiran dan perasaan kita. Namun, ketika kita tuliskan fakta tersebut menjadi sebuah berita, bisakah dipisahkan dari opini? Nampaknya tidak, karena menulis adalah aktivitas subyektif. Menulis berita sejatinya merupakan proses membangun realitas (*constructing reality*) berdasarkan fakta-fakta yang kita miliki.

Bahkan cara kita melihat fakta sudah merupakan proses subyektif. Tiap orang punya sudut pandang yang berbeda, seperti yang tergambar dalam konsepsi *framing*. Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002), *framing* menggambarkan bagaimana media atau wartawan melakukan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, dan lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/ peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain.

Realitas *framing* tersebut menjelaskan bahwa seobyektif-obyektifnya wartawan dalam menulis berita, dia tetap akan terjebak dalam praktik subyektif. Fakta memang tak akan pernah bisa dipisahkan dari nilai. Kembali pada apa yang dikatakan Ward (1998), semua pengetahuan, bahkan termasuk data-data sains tidak bisa menjadi bebas nilai. Dalam pan-

dangan ini, berarti tidak bisa tidak wartawan pasti akan subyektif. Dengan kata lain, ini se-bentuk obyektifitas yang subyektif.

Memaknai ulang obyektifitas menjadi relevan, karena prinsip ini bisa bias ketika menjadi selubung ketidakpedulian pada kebenaran. Justru ketika mereka mengatasnamakan kebenaran. Lihatlah slogan salah satu media: 'Kebenaran itu tidak memihak', terasa sungguh naif. Jurnalis merasa seolah-olah terbebas dari dosa, bahkan merasa mulia, setelah mematuhi kaidah pemberitaan berimbang, meliput dua pihak yang berselisih tanpa mempedulikan kebenaran dari fakta yang disampaikan pihak-pihak tersebut. Jurnalis seolah lari dari tanggung jawab atas kebenaran fakta peristiwa, dengan dalih biarkan khalayak sendiri yang memaknainya.

Obyektifitas pun bias ketika justru mengabaikan konteks dan substansi. *Hutchin Comission*, suatu kelompok peneliti di Amerika Serikat yang bekerja selama bertahun-tahun menghasilkan dokumen yang menggariskan kewajiban jurnalisme, memperingatkan adanya bahaya menerbitkan laporan yang "secara faktual benar tapi secara substansial salah". Komisi ini memberikan contoh, saat itu banyak berita seputar orang-orang minoritas yang justru menguatkan stereotipe yang keliru, karena media gagal untuk menampilkan konteks atau menegaskan identitas ras atau etnisitas tanpa alasan yang tepat. (Kovach dan Rosenstiel, 2001)

Era jurnalisme profesional telah menyuguhkan informasi berlimpah ruah, menembus batas-batas geografis, dengan standar konvensional yang dibanggakan. Tetapi, kata Charlotte Dennet (2004), ada satu hal yang

seringkali dilupakan media arus utama, yakni 'konteks'. Dalam peristiwa 9/11 misalnya, terang mantan reporter Middle East Sketch itu, publik Amerika Serikat dibuat bingung di tengah melimpahnya informasi, karena media arus utama tak menghadirkan konteks peristiwanya.

Obyektifitas dalam jurnalisme tetaplah relevan, jika dimaknai sebagai komitmen profesionalisme, bukan sebagai wujud pengingkaran atas realitas keberpihakan media. Profesionalisme ini terkait dengan kepatuhan pada nilai-nilai dasar dalam proses jurnalisme seperti kejujuran dan akurasi. Di sini, Obyektifitas lebih menggambarkan kedisiplinan dalam proses mencari fakta. Sementara keberpihakan, kita artikan sebagai komitmen pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh jurnalis. Jurnalis tak cukup mengumpulkan dan merangkai fakta, tetapi juga harus memberikan makna. Tak hanya mengabarkan peristiwa, tetapi juga memberikan perspektif. Tak hanya menyusun alur cerita yang masuk akal dan mengalir, tetapi juga memberikan konteks se-buah persoalan.

Tak ada yang salah dengan subyektifitas, terutama jika dimaknai sebagai penegasan identitas. Jurnalis atau penulis akan lebih relevan keberadaannya jika mampu membuat terang sebuah masalah. Keberpihakan tak terhindarkan, bahkan harus, yakni pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Tak ada realitas yang obyektif. Karena, realitas sejatinya adalah apa yang kita yakini kebenarannya. Kitalah yang mendefinisikan peristiwa dan menilai seseorang. Maka biarkanlan berita subjektif secara perspektif, tetapi objektif dalam proses. Jadi, ini merupakan praktik 'subyektifitas yang

## Daftar Pustaka

- Dennis, Everrete E & Merrill, John C. 1984. *Basic Issues in Mass Communication: A Debate*. New Jersey: Prentice Hall
- Dennett, Charlotte. 2004. Perang Melawan Teror dan Permainan Besar untuk Minyak: Bagaimana Media Kehilangan Konteks. Dalam Borjesson, Kristina (Penyunting). "*Mesin Penindas Pers*". Bandung: Q-Press
- Durham, Meenakshi Gigi. On the Relevance of Standpoint Epistemology to the practice of Journalism: The Case for "Strong Objectivity". *Communication Theory* 8:117-138.
- Entman, Robert M. 1989. *Democracy Without Citizens: Media and the Decay of American Politics*. New York: Oxford University Press

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstuksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Erjavec, Karmen. 2003. Media Construction of Identity Through Moral Panics: Discourse of Immigration in Slovenia. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 29: 74-83.
- Ishwara, Luwi. 1998. *Jurnalisme Dasar*. Makalah disampaikan dalam pelatihan jurnalistik Koran Kampus Manunggal Undip, Semarang. 16-17 Juni 1998.
- Kusumaningrat, Kusuma & Kusumaningrat, Purnama. 2005. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kovack, Bill & Rosentiel, Tom. 2001. *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*. Terjemahan Yusi A. Pareanom. Jakarta: Pantau.
- Nelkin, Dorothy. 1987. *Selling Science: How the Press Covers Science and Technology*. New York: Macmillan Publishing
- Oetama, Jakob. 2003. *Antara Jurnalisme Fakta dan Jurnalisme Makna*. Naskah pidato disampaikan dalam pengukuhan gelar honoris causa di UMG. Yogyakarta, 17 April 2003.
- McQuail, Dennis. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory 5<sup>th</sup> Edition*. London: Sage Publication
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: P\_Idea.
- Ward, Stephen. 1998. Journalism in The New Millenium. Dalam Logan, Donna (penyunting). *"Pragmatic Objectivity and a New Ethic for Changing Times" Selected Reading*. Hlm.157-165. Vancouver: Sing Tao School of Journalism.